

DAFTAR ISI

Halaman pengesahan	
Pernyataan	i
Prakata	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
Intisari	xiii
Abstrack	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	
1.4.1 Manfaat Teoritis	12
1.4.2 Manfaat Praktis	
1.4.2.1 Bagi Peneliti	12
1.4.2.2 Bagi Komunitas Akademik	13
1.4.2.3 Bagi Pemerintah Kabupaten Alor	13
1.5 Keaslian Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Tinjauan Pustaka	
2.1.1 Penyediaan dan Penyebaran Informasi Pembangunan	
2.1.1.1 Informasi	18
2.1.1.2 Pembangunan	19
2.1.1.3 Informasi Pembangunan	21
2.1.1.4 Penyediaan Informasi Pembangunan	25
2.1.1.5 Penyebaran Informasi Pembangunan	27

2.1.2	Peran informasi dalam pembangunan di berbagai negara	28
2.1.3	Praktek penyediaan dan penyebaran informasi pembangunan di Indonesia	34
2.1.4	Kategorisasi pesan	36
2.2	Landasan Teori	
2.2.1	Teori Perencanaan Komunikasi	38
2.2.1.1	Teori Integrasi Informasi	42
2.2.1.2	Perencanaan Komunikasi Middleton	44
2.3	Kerangka pikir	47
2.4	Definisi operasional	47
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		
3.1	Metode dasar penelitian	49
3.2	Metode pengambilan data	
3.2.1	Lokasi dan unit objek penelitian	50
3.2.2	Metode penentuan informan	52
3.2.3	Sumber dan Teknik pengumpulan data	53
3.2.3.1	Wawancara	53
3.2.3.2	Dokumen	54
3.2.4	Validitas data	54
3.2.5	Teknik analisis data	55
BAB IV DESKRIPSI WILAYAH		
4.1	Deskripsi Kabupaten Alor	
4.1.1	Deskripsi Wilayah	57
4.1.2	Deskripsi Pemerintahan	59
4.1.3	Deskripsi OPD yang menjadi objek penelitian	
4.1.3.1	Deskripsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	63
4.1.3.2	Deskripsi Dinas Komunikasi dan Informatika	66
4.1.3.3	Deskripsi Bagian Humas dan Dokumentasi	68

4.1.3.4	Deskripsi Bagian Administrasi Pembangunan	71
4.1.3.5	Deskripsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	73
4.1.3.6	Deskripsi Dinas Pertanian dan Perkebunan	75
4.1.3.7	Deskripsi Dinas Kesehatan	77
BAB V HASIL TEMUAN		
5.1	Penyediaan informasi pembangunan	
5.1.1	Gambaran umum penyediaan informasi pembangunan	81
5.1.2	Penyediaan informasi pembangunan oleh OPD operatif/teknis	85
5.1.2.1	Penyediaan Informasi Pembangunan di Dinas Pertanian dan Perkebunan	85
5.1.2.2	Penyediaan Informasi Pembangunan di Dinas Kesehatan	90
5.1.2.3	Penyediaan Informasi Pembangunan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	94
5.1.3	Penyediaan informasi pembangunan oleh OPD Administratif Menengah	
5.1.3.1	Penyediaan Informasi Pembangunan di Bagian Administrasi Pembangunan	99
5.1.4	Penyediaan informasi pembangunan oleh OPD Administratif Puncak	
5.1.4.1	Penyediaan Informasi Pembangunan di Dinas Komunikasi dan Informatika.	101
5.1.4.2	Penyediaan Informasi Pembangunan di Bagian Administrasi Humas dan Dokumentasi	105
5.1.4.3	Penyediaan Informasi Pembangunan di Bappelitbang	106
5.2	Penyebaran informasi pembangunan	
5.2.1	Gambaran umum penyebaran informasi pembangunan	110
5.2.2	Penyebaran informasi pembangunan oleh OPD operatif/teknis	
5.2.2.1	Penyebaran Informasi Pembangunan di Dinas Pertanian dan Perkebunan	110

5.2.2.1.1	Informasi tentang kondisi tanah, musim tanam, iklim, dan cuaca	112
5.2.2.1.2	Informasi tentang program dan kegiatan	114
5.2.2.1.3	Informasi tentang aturan dan keputusan yang berkaitan dengan masyarakat	115
5.2.2.1.4	Informasi tentang mekanisme mengakses layanan pertanian	116
5.2.2.1.5	Informasi tentang inovasi baru	117
5.2.2.2	Penyebaran informasi pembangunan oleh Dinas Kesehatan	117
5.2.2.2.1	Informasi tentang Penyakit	118
5.2.2.2.2	Informasi tentang aturan yang berkaitan langsung dengan masyarakat	120
5.2.2.2.3	Informasi tentang program dan kegiatan	121
5.2.2.2.4	Informasi tentang Pelayanan Masyarakat	122
5.2.2.3	Penyebaran Informasi Pembangunan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	123
5.2.2.3.1	Informasi tentang Program KB	124
5.2.2.3.2	Informasi tentang Program dan Kegiatan	127
5.2.2.3.3	Informasi tentang Data Kependudukan	128
5.2.2.3.4	Informasi tentang Kebijakan Pemerintah Pusat	129
5.2.2.3.5	Informasi tentang aturan yang berkaitan langsung dengan masyarakat	130
5.2.3	Penyebaran informasi pembangunan oleh OPD Administratif Menengah	
5.2.3.1	Penyebaran Informasi Pembangunan oleh Bagian Administrasi Pembangunan Setda Alor	130
5.2.4	Penyebaran informasi pembangunan oleh OPD Administratif Puncak	
5.2.4.1	Penyebaran Informasi Pembangunan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	131

5.2.4.1.1	Informasi program dan kegiatan internal	132
5.2.4.1.2	Informasi program dan kegiatan eksternal	134
5.2.4.1.3	Penyebaran Informasi buku Alor dalam angka	135
5.2.4.2	Penyebaran Informasi Pembangunan oleh Bagian Humas dan Dokumentasi Setda Alor	136
5.2.4.3	Penyebaran Informasi Pembangunan oleh Bappelitbang	138
BAB VI PEMBAHASAN		
6.1	Penyediaan informasi pembangunan	142
6.1.1	Jenis informasi pembangunan yang disediakan	145
6.1.2	Proses penyediaan informasi pembangunan	149
6.1.3	Aktor yang terlibat dalam penyediaan informasi pembangunan	153
6.1.4	Tempat dan waktu penyediaan informasi pembangunan	159
6.1.5	Hambatan dalam penyediaan informasi pembangunan	162
6.2	Penyebaran informasi pembangunan	165
6.2.1	Jenis informasi pembangunan yang disediakan	168
6.2.2	Proses penyebaran informasi pembangunan	171
6.2.3	Aktor yang terlibat dalam penyebaran informasi pembangunan	174
6.2.4	Tempat dan waktu penyebaran informasi pembangunan	177
6.2.5	Hambatan dalam penyebaran informasi pembangunan	178
6.2.5.1	Hambatan Eksternal	178
6.2.5.2	Hambatan Sumber Daya Manusia	181
6.2.5.3	Hambatan Organisasi	182
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN		
7.1	Kesimpulan	184
7.2	Saran	189
	Daftar Pustaka	191

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Hasil penelitian <i>The World Wide Web Foundation</i> terhadap 86 Negara terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik oleh Pemerintah	5
Tabel 1.2	Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penyediaan dan penyebaran informasi	15
Tabel 2.1	Definisi operasional	48
Tabel 4.1	Daftar Kecamatan di Kabupaten Alor beserta luas wilayah	57
Tabel 4.2	Bupati Alor dari masa ke masa	58
Tabel 4.3	Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Alor	62
Tabel 4.4	Jumlah Aparatur Sipil Negara Kabupaten Alor tahun 2014	63
Tabel 4.5	Jumlah Penyuluh KB (PKB) Berdasarkan Kecamatan	73
Tabel 4.6	Jumlah Penyuluh Pertanian PNS dan Tenaga Kontrak Berdasarkan Kecamatan	76
Tabel 4.7	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dimiliki	78
Tabel 5.1	Informasi pembangunan yang disediakan di Dinas Pertanian dan Perkebunan	88
Tabel 5.2	Informasi pembangunan yang disediakan di Dinas Kesehatan	93
Tabel 5.3	Informasi pembangunan yang disediakan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	98
Tabel 5.4	Informasi pembangunan yang disediakan di Bagian Administrasi Pembangunan Setda Alor	100
Tabel 5.5	Informasi pembangunan yang disediakan di Dinas Komunikasi dan Informatika	101
Tabel 5.6	Informasi pembangunan yang disediakan di Bagian Humas dan Dokumentasi Setda Alor	106
Tabel 5.7	Informasi pembangunan yang disediakan di Bappelitbang	109
Tabel 5.8	Informasi Pembangunan yang disebarkan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Alor	111

Tabel 5.9	Informasi Pembangunan yang disebarakan oleh Dinas Kesehatan	118
Tabel 5.10	Informasi Pembangunan yang disebarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	124
Tabel 5.11	Informasi Pembangunan yang disebarakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan Setda Alor	131
Tabel 5.12	Informasi Pembangunan yang disebarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor	132
Tabel 5.13	Informasi Pembangunan yang disebarakan oleh Bagian Humas dan Dokumentasi Setda Alor	137
Tabel 5.14	Informasi Pembangunan yang disebarakan oleh Bappelitbang	140
Tabel 6.1	Jenis informasi pembangunan yang disediakan di OPD	146
Tabel 6.2	Bidang Koordinasi di Bappelitbang	158
Tabel 6.3	Waktu penyediaan informasi pembangunan	160
Tabel 6.4	Jenis informasi pembangunan yang disebarakan oleh OPD	169
Tabel 6.5	Waktu dan tempat penyebaran informasi pembangunan	177

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Informasi Pembangunan menurut Undang - undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 391 dan 392	24
Gambar 2.2	Sumber penyediaan Informasi Pembangunan	26
Gambar 2.3	Hasil penelitian Schramm yang digambarkan oleh Nasution	30
Gambar 2.4	Model Teori Perencanaan Komunikasi Berger	41
Gambar 2.5	Kerangka Teori	43
Gambar 2.6	Perencanaan Komunikasi Lingkaran Middleton	44
Gambar 2.7	Kerangka Pemikiran Penelitian	47
Gambar 4.1	Pegawai Bappelitbang berdasarkan jenis kelamin	64
Gambar 4.2	Pegawai Bappelitbang berdasarkan tingkat Pendidikan	64
Gambar 4.3	Pegawai Bappelitbang berdasarkan keaktifan	65
Gambar 4.4	Pegawai Bappelitbang berdasarkan golongan kepangkatan	65
Gambar 4.5	Struktur Organisasi Bappelitbang	65
Gambar 4.6	Pegawai Diskominfo berdasarkan jenis kelamin	66
Gambar 4.7	Pegawai Diskominfo berdasarkan Latar belakang Pendidikan	66
Gambar 4.8	Struktur Organisasi Dinas Kominfo	67
Gambar 4.9	Pegawai Diskominfo berdasarkan Golongan	67
Gambar 4.10	Pegawai Bagian Humas dan Dokumentasi berdasarkan jenis kelamin	68
Gambar 4.11	Pegawai Bagian Humas dan Dokumentasi berdasarkan Pendidikan ..	68
Gambar 4.12	Pegawai Bagian Humas dan Dokumentasi berdasarkan Status keaktifan	69
Gambar 4.13	Pegawai Bagian Humas dan Dokumentasi berdasarkan Golongan Kepangkatan	69
Gambar 4.14	Struktur Organisasi Bagian Humas dan Dokumentasi	70
Gambar 4.15	Pegawai Bagian Administrasi Pembangunan sesuai tingkat Pendidikan	71
Gambar 4.16	Pegawai Bagian Administrasi Pembangunan berdasarkan jenis kelamin	71

Gambar 4.17	Pegawai Bagian Administrasi Pembangunan berdasarkan golongan ..	72
Gambar 4.18	Struktur Organisasi Bagian Administrasi Pembangunan	72
Gambar 4.19	Stuktur Organisasi Dinas PPKB	74
Gambar 4.20	Staf Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan berdasarkan jenis kelamin	75
Gambar 4.21	Staf Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan berdasarkan Golongan	75
Gambar 4.22	Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan	77
Gambar 4.23	Jumlah Karyawan PNS Dinkes berdasarkan jenis kelamin	78
Gambar 4.24	Jumlah Karyawan Dinkes berdasarkan golongan	78
Gambar 4.25	Jumlah Karyawan Dinkes berdasarkan tingkat Pendidikan	79
Gambar 4.26	Stuktur Organisasi Dinas Kesehatan	80
Gambar 5.1	Alur penyediaan informasi pembangunan	81
Gambar 5.2	Alur penyebaran informasi pembangunan	110
Gambar 6.1	Gambaran umum penyediaan informasi pembangunan	142
Gambar 6.2	Komunikasi yang ideal antara setiap lini	144
Gambar 6.3	Proses penyediaan informasi pembangunan	149
Gambar 6.4	Aktor yang terlibat dalam penyediaan informasi pembangunan di OPD Teknis	154
Gambar 6.5	Perbedaan waktu dalam penyediaan informasi pembangunan	160
Gambar 6.6	Tempat penyediaan informasi pembangunan	162
Gambar 6.7	Hambatan dalam penyediaan informasi pembangunan	163
Gambar 6.8	Gambaran umum penyebaran informasi pembangunan	165
Gambar 6.9	Metode penyebaran informasi pembangunan	171
Gambar 6.10	Aktor dalam penyebaran informasi pembangunan	175
Gambar 6.11	Hambatan dalam penyebaran informasi pembangunan	178
Gambar 6.12	Hambatan eksternal	179
Gambar 6.13	Alur Penyediaan dan Penyebaran Informasi Pembangunan	183